

KEKERASAN ANAK DALAM KELUARGA: CATATAN SERIUS PEMBANGUNAN KELUARGA INDONESIA

21

Sulis Winurini¹ dan Timothy Joseph Shekinah Glory²

Abstrak

Seiring banyaknya kasus kekerasan anak dalam keluarga yang terungkap, pembangunan keluarga menjadi sorotan. Tulisan ini menggambarkan permasalahan kekerasan anak dalam keluarga dan kaitannya dengan pembangunan keluarga. Kekerasan terhadap anak paling banyak terjadi di dalam keluarga, di mana orang tua termasuk yang paling banyak melakukan kekerasan. Kekerasan anak dalam keluarga sering luput dari perhatian, menjadi fenomena gunung es, tidak tertangani dengan cepat dan biasanya baru diketahui ketika korban sudah mengalami luka serius atau meninggal dunia. Oleh sebab itu, kekerasan anak dalam keluarga perlu dilihat sebagai permasalahan yang harus diwaspadai. Beberapa upaya bisa dilakukan, seperti memperkuat pemberdayaan masyarakat guna membantu identifikasi keluarga rentan dan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat, memaksimalkan edukasi terkait kekerasan dalam keluarga, dan memperkuat peran orang tua. Komisi IX DPR RI perlu mendesak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk mengoptimalkan pembangunan keluarga dan memperkuat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain terkait pencegahan kekerasan anak dalam keluarga.

Pendahuluan

Kasus kekerasan anak dalam keluarga kembali menjadi sorotan akhir-akhir ini. Seorang ayah di Majalengka merantai leher kedua anaknya karena meyakini anaknya tersebut melakukan pencurian (Darmawan, 2024). Kemudian, seorang anak di Batam dianiaya dan

dirantai oleh ibunya hanya karena menyembunyikan ponsel (Hamapu, 2024). Beberapa bulan lalu, seorang anak ditemukan tewas di dalam karung akibat disiksa ibu tirinya yang cemburu karena korban lebih disayang suaminya (Rachmawati, 2024). Aksi penganiayaan sadis seorang ibu terhadap anaknya di

¹ Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: sulis.winurini@dpr.go.id.

² Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: timothy.glory@dpr.go.id



Medan juga sempat viral di media sosial hingga memicu kemarahan publik (Rahyuni, 2024).

Kekerasan dapat berdampak serius pada anak, tidak hanya mengakibatkan luka fisik, tetapi juga luka psikis, dan gangguan perilaku yang dirasakan anak dalam jangka panjang hingga mempengaruhi keseluruhan hidupnya. Anak yang terbiasa hidup dalam kekerasan, terlebih kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga, akan belajar bahwa kekerasan adalah penyelesaian masalah yang wajar. Akhirnya, mereka rentan mengalami kekerasan atau bahkan menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari. Sulit bagi Indonesia untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas apabila anak-anaknya dibesarkan dengan kekerasan.

Pembangunan keluarga adalah kunci sukses pembangunan SDM karena keluarga yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik akan menghasilkan SDM yang berkualitas. Banyaknya kasus kekerasan anak dalam keluarga menjadi tantangan bagi pembangunan keluarga, sekaligus pembangunan SDM Indonesia sebagaimana misi Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Tulisan ini menggambarkan permasalahan kekerasan anak dalam keluarga dan kaitannya dengan pembangunan keluarga.

Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar keluarga memiliki rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Tujuan pembangunan keluarga ini diarahkan pada pencapaian keluarga berkualitas, berketahanan

dan sejahtera lahir batin sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga menjadi parameter di dalam pembangunan keluarga, yang terukur melalui iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga). Capaian iBangga tercatat mengalami peningkatan, dari yang sebelumnya 56,7 pada tahun 2022 menjadi 61,43 pada tahun 2023. Capaian 61,43 telah melebihi target tahun 2023 sebesar 59, bahkan melebihi target tahun 2024 sebesar 61 (Alam, 2024). Apabila mengacu pada capaian iBangga, keluarga Indonesia masuk dalam kategori cukup baik atau berkembang, bukan lagi rentan.

Permasalahan Kekerasan Anak dalam Keluarga

Pada sisi yang berbeda, kekerasan anak menjadi fenomena yang masih mewarnai keluarga Indonesia hingga saat ini. Dengan kerentanannya, anak seringkali dihadapkan pada kekerasan, termasuk di dalam keluarga. Kekerasan anak dalam keluarga adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang di dalam keluarga yang mengakibatkan penderitaan terhadap anak, baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Data pada Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) menunjukkan, jumlah kasus dan korban kekerasan anak (0-17 tahun) mengalami kenaikan beberapa tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Anak

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban
2020	11.264	12.410
2021	14.446	15.914
2022	16.106	17.641
2023	18.175	20.221

Sumber: Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (2024)

Hingga November 2024, angka kekerasan anak masih tinggi. Jumlah kasus kekerasan anak mencapai 14.308 kasus dengan jumlah korban sebanyak 15.886 anak (Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, 2024).

Temuan lain dari SIMFONI-PPA menunjukkan, kekerasan anak memiliki pola yang sama dari tahun ke tahun. *Pertama*, pelaku kekerasan anak didominasi orang terdekat, dan orang tua termasuk yang tertinggi setelah pacar/teman anak. Orang tua yang menjadi pelaku kekerasan anak berturut-turut pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 adalah 20,05% (2.516 orang), 21,01% (2.771 orang), 19,47% (3.050 orang), dan 19,45% (2.389 orang). *Kedua*, jumlah kasus terbanyak terjadi di dalam rumah tangga. Kasus kekerasan anak yang terjadi di dalam rumah tangga berturut-turut pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 adalah 48% (6.953 kasus), 53% (8.565 kasus), 52% (9.421 kasus), dan 53% (7.644 kasus) (Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, 2024).

Temuan tersebut sekaligus menunjukkan sebuah ironi. Orang tua adalah kunci sukses pelaksanaan fungsi keluarga karena orang tua adalah pengendali keluarga (Herawati et al., 2020). Namun dengan banyaknya orang tua menjadi pelaku kekerasan, berarti mereka gagal mewujudkan

keberfungsian keluarga. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan tenang, keluarga yang seharusnya menjadi pelindung dan sumber kasih sayang, justru menjadi ancaman terbesar bagi anak (Suyanto, 2023).

Banyak literatur menyebutkan, meningkatnya kekerasan anak dalam keluarga bukan hanya berkaitan dengan kondisi psikologis orang tua yang kurang sabar dan terbiasa melakukan tindak kekerasan atau kondisi ekonomi yang terganggu akibat situasi krisis. Namun juga berkaitan dengan pandangan sebagian masyarakat yang masih meyakini bahwa tindak kekerasan adalah bagian dari cara mendidik anak. Sayangnya, sebagian masyarakat menganggap kekerasan anak sebagai persoalan internal masing-masing keluarga sehingga mereka tidak berani terlibat, kecuali jika korban sudah mengalami luka serius, bahkan kematian (dalam Suyanto, 2023).

Selain itu, anak yang menjadi korban kekerasan biasanya sulit melaporkan tindak kekerasan. Oleh karena tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri, mereka bergantung pada orang dewasa, terutama orang tua. Hal ini membuat mereka semakin sulit melakukan pengaduan ketika pelaku kekerasan adalah orang tua, pihak yang seharusnya menjadi pelindung

dan tumpuan kasih sayang keluarga. Keterbatasan anak dalam mengambil solusi juga membuat mereka seringkali kebingungan untuk mencari pertolongan yang tepat. Berbagai permasalahan ini menyebabkan kasus kekerasan anak dalam keluarga sering luput dari perhatian sehingga tumbuh subur, menjadi fenomena gunung es, dan tidak tertangani dengan cepat.

Berdasarkan hal di atas, pencapaian pemerintah, yaitu Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (KKPK/BKKBN), dalam pembangunan keluarga melalui iBangga masih terlalu dini jika disebut keberhasilan. Adanya kekerasan dalam keluarga menandakan tidak ada ketenteraman dan kebahagiaan sehingga keluarga sulit mencapai apa yang dituju dalam pembangunan keluarga. Lebih jauh lagi, munculnya kekerasan anak dalam keluarga perlu dilihat sebagai permasalahan yang harus diwaspadai. Terlebih dengan adanya fenomena gunung es, di mana data-data yang ditampilkan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Besar kemungkinan kasus-kasus serupa masih jauh lebih banyak dan baru diketahui atau dilaporkan ketika dampaknya sudah sangat serius.

Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan keluarga, permasalahan kekerasan anak dalam keluarga perlu diatasi. Beberapa upaya perlu menjadi prioritas untuk dilakukan. *Pertama*, memperkuat pemberdayaan masyarakat untuk mempertajam identifikasi keluarga rentan,

selain juga untuk meningkatkan kepedulian masyarakat. *Kedua*, memaksimalkan edukasi terkait kekerasan dalam keluarga kepada masyarakat, terutama kepada orang tua dan anak. *Ketiga*, memperkuat peran orang tua dalam pencegahan kekerasan anak di dalam keluarga. Harapannya, dengan pembangunan keluarga yang optimal, Indonesia mampu mempersiapkan SDM berdaya saing demi terwujudnya Generasi Emas Tahun 2045.

Penutup

Kekerasan anak paling banyak terjadi di dalam keluarga, di mana orang tua termasuk yang paling banyak melakukan kekerasan. Permasalahan ini sering luput dari perhatian, menjadi fenomena gunung es, dan tidak tertangani dengan cepat sehingga menghambat pencapaian tujuan pembangunan keluarga. Oleh karenanya, kekerasan anak dalam keluarga perlu dilihat sebagai permasalahan yang harus diwaspadai.

Sebagai Kementerian/Lembaga baru, KKPK yang sebelumnya adalah BKKBN menjadi harapan baru dalam pembangunan keluarga Indonesia. Komisi IX DPR RI perlu mendesak KKPK untuk mengoptimalkan pembangunan keluarga, salah satunya melalui program bimbingan pranikah. Komisi IX DPR RI perlu mendorong KPPK untuk memperkuat koordinasi dengan K/L lain. Pertama, dengan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya kekerasan dalam keluarga. Kedua, dengan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat dukungan psikososial bagi keluarga.

Referensi

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2020). *Buku saku pengenalan indeks pembangunan keluarga*. https://siperindu.online/dokumen/Ebook_iBangga.pdf
- Herawati, T., Krisnatuti, D., Pujihasyuty, R., & Latifah, E. W. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi keluarga di Indonesia. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 13(3), 213-227.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2024, Oktober 11). Kemenko PMK paparkan tren capaian positif pembangunan anak, perempuan, pemuda dan keluarga. *kemenkopmk.go.id*. <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-paparkan-tren-capaian-positif-pembangunan-anak-perempuan-pemuda-dan-keluarga>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). SIMFONI-PPA. *Ringkasan data kekerasan*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Suyanto, B. (2023, Desember 26). Anak korban kekerasan dalam keluarga dan masalah baru. *Kompas.com*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/22/anak-korban-kekerasan-dalam-keluarga-dan-masalah-baru>